

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 HASIL PENELITIAN

##### 4.1.1 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 1 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 2016 juga menjelaskan bahwa dalam pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

- 1) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah
- 2) Intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah
- 3) Efisiensi
- 4) Efektivitas
- 5) Pembagian habis tugas
- 6) Rentang kendali
- 7) Tata kerja yang jelas
- 8) Fleksibilitas

Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam beberapa waktu mengalami perubahan dalam penyebutan nomenklatur dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berubah menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dan terakhir kembali lagi menjadi satuan kerja perangkat daerah

(SKPD) berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 061/4892/OTDA tertanggal 10 juni 2017 yang menyebutkan penggunaan kembali nomenklatur SKPD sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pasal 2 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo terdiri atas:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Inspektorat
- 4) Dinas
- 5) Badan
- 6) Kecamatan

Pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 pada badan dan dinas daerah melaksanakan sebagian teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Adapun selain dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

dibidang kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat. Adapun yang termasuk SKPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**  
**Kabupaten Ponorogo**

No.	Nama Instansi
1	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Dinas Pendidikan
3	Dinas Kesehatan
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
6	Dinas Tenaga Kerja
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
10	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
11	Dinas Lingkungan Hidup
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
18	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Satuan Polisi Pamong Praja
23	Inspektorat
24	Kecamatan Sampung
25	Kecamatan Badegan
26	Kecamatan Jambon
27	Kecamatan Balong
28	Kecamatan Slahung
29	Kecamatan Bungkal
30	Kecamatan Ngrayun

No.	Nama Instansi
31	Kecamatan Sambit
32	Kecamatan Sawoo
33	Kecamatan Mlarak
34	Kecamatan Jetis
35	Kecamatan Pulung
36	Kecamatan Ngebel
37	Kecamatan Sooko
38	Kecamatan Pudak
39	Kecamatan Ponorogo
40	Kecamatan Jenangan
41	Kecamatan Babadan
42	Kecamatan Siman
43	Kecamatan Kauman
44	Kecamatan Sukorejo
45	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hardjono
46	Sekretariat DPRD
47	Sekretariat Daerah

Sumber: Data diolah dari BKD Kabupaten Ponorogo, 2020

### 1. Statistik Deskriptif Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan data identitas dari responden yang tercantum didalam kuesioner yang berupa jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Data dari responden ini diperlukan guna memberikan informasi profil dari masing-masing responden pada organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo. Informasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja dapat peneliti peroleh dari pengisian kuesioner yang kembali.

Berikut ini karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja. Gambaran terkait karakteristik dapat ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Jenis kelamin**

		Frequency	Percent
Valid	laki-laki	45	44,6
	Perempuan	56	55,4
	Total	101	100,0

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

berdasarkan tabel 4.2 dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 45 orang atau 44,6% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 atau 55,4%. Sehingga dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan dalam pengisian kuesioner ini.

**Tabel 4.3**

		Frequency	Percent
Valid	< 30 tahun	15	14,9
	31-40 tahun	29	28,7
	41-50 tahun	40	39,6
	> 50 tahun	17	16,8
	Total	101	100,0

**Usia**

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Karakteristik responden kedua yaitu usia. Dilihat dari tabel 4.3 responden yang berusia <30 tahun yaitu 15 orang atau 14,9%, berusia 31-40 tahun yaitu 29 orang atau 28,7%, berusia 41-50 tahun 40 orang atau 39,6%,

dan yang berusia >50 tahun 17 orang atau 16,8%. Sehingga responden yang berusia antaran 41-50 tahun lebih dominan dalam pengisian kuesioner.

**Tabel 4.4**  
**Tingkat Pendidikan**

		Frequency	Percent
Valid	SLTA	8	7,9
	D3	13	12,9
	S1	69	68,3
	S2	11	10,9
	Total	101	100,0

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.4 responden dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu 8 orang atau 7,9%, tingkat pendidikan diploma yaitu 13 orang atau 12,9%, tingkat pendidikan sarjana yaitu 69 orang atau 68,3%, dan responden yang jenjang pendidikannya pasca sarjana 11 orang atau 10,9%. Sehingga responden dengan tingkat pendidikan sarjana mendominasi dalam kuesioner penelitian ini.

**Tabel 4.5**

Masa Kerja	Frequency	Percent
1-5 tahun	15	14,9
6-10 tahun	27	26,7
11-20 tahun	18	17,8
21-30 tahun	35	34,7

> 30 tahun	6	5,9
Total	101	100,0

asa

### Kerja

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 15 orang atau 14,9% bekerja selama 1-5 tahun, sebanyak 27 orang atau 26,7% sudah bekerja selama 6-10 tahun, sebanyak 18 orang atau 17,8% bekerja selama 11-20 tahun, responden yang bekerja selama 21-30 tahun sebanyak 35 orang atau 34,7%, sedangkan yang bekerja lebih dari 30 tahun sebanyak 6 orang atau 5,9%. Sehingga responden pada penelitian ini didominasi oleh pegawai yang bekerja antara 21-30 tahun.

Adanya beberapa tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 47 SKPD, terdapat 101 responden yang dapat diolah datanya maka responden yang berjenis kelamin perempuan mendominasi dalam pengisian kuesioner, dan usia responden mayoritas 41-50 tahun yang memiliki jenjang pendidikan sarjana. Banyaknya lulusan sarjana yang mendominasi dalam pengisian keusioner, dikarenakan jabatan yang diteliti dalam penelitian ini juga mengharuskan responden memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki masa kerja 21-30 tahun.

#### 4.1.2 HASIL PENGUMPULAN DATA

Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 16 Dinas, 5 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 21 Kecamatan, dan 1 RSUD dengan objek penelitian pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo yang menjabat sebagai kepala bagian keuangan, bendahara, dan staf keuangan.

Pemilihan sampel penelitian ini didasarkan menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti. Penelitian ini menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data, data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo. Kuesioner penelitian diantar langsung dan dijemput langsung pada responden, dan lama penyebaran kuesioner sampai pengumpulan kembali kuesioner yang disebarkan dari bulan Desember – Januari 2021. Setiap SKPD diberikan 3 kuesioner secara merata, untuk yang mengisi kuesioner tersebut yaitu kepala bagian keuangan, bendahara, dan staf keuangan. Sehingga total kuesioner yang disebarkan adalah 141 kuesioner.

**Tabel 4.6**

#### **Rekapitulasi Kuesioner**

<b>Item</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentase</b>
Jumlah kuesioner yang disebarkan	<b>141</b>	<b>100%</b>
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	<b>(13)</b>	<b>(9%)</b>
Jumlah kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap	<b>(27)</b>	<b>(19%)</b>



Jumlah kuesioner yang dapat diolah	<b>101</b>	<b>72%</b>
------------------------------------	------------	------------

Sumber : Data primer, diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat dari 141 kuesioner yang telah dikirim pada 47 SKPD, ada 13 atau 9% yang tidak kembali karena beberapa pegawai SKPD yang menjadi responden dinas keluar kota dan kuesioner dibawa, dan 27 atau 19% yang pengisiannya tidak lengkap karena tidak semua pernyataan dijawab oleh responden. Sehingga kuesioner yang dapat diolah sebanyak 101 atau sebesar 72%.

Berikut ini menunjukkan hasil rekapitulasi jawaban dari responden atas pernyataan yang diajukan peneliti. Setiap item pernyataan merupakan gambaran yang menunjukkan variabel penelitian. Variabel penelitian ini yaitu Tekanan Eksternal (X1) dengan jumlah 6 item pernyataan, Ketidakpastian Lingkungan (X2) dengan jumlah 4 item pernyataan, Akuntabilitas (X3) dengan jumlah 7 item pernyataan, Sistem Pengendalian Internal (X4) dengan jumlah 9 item pernyataan, dan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Y) dengan jumlah 5 item pernyataan. Masing-masing item pernyataan tersebut diukur menggunakan *Skala Likert* 5 poin. Hasil rekapitulasi jawaban responden untuk setiap item pernyataan dari variabel penelitian ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Hasil Rekapitulasi Item Pernyataan Variabel Tekanan Eksternal (X1)**

TEKANAN EKSTERNAL (X1)												
Pernyataan	Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X1.1	26	26	70	70	5	5	0	0	0	0	101	100
X1.2	19	19	65	65	17	17	0	0	0	0	101	100
X1.3	9	9	69	69	11	11	9	9	3	3	101	100
X1.4	12	12	64	64	14	14	11	11	0	0	101	100

X1.5	5	5	52	52	27	27	12	12	5	5	101	100
X1.6	5	5	54	54	28	28	14	14	0	0	101	100
Rata-rata	13%		62,3 %		17%		7,7%		1,3%		100%	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.7 hasil jawaban dari responden pada variabel tekanan eksternal diketahui ada 101 responden. Jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan sangat beragam. Dilihat dari nilai rata-rata responden, responden yang menjawab sangat setuju 13%, sejumlah 62,3% menyatakan setuju, sejumlah 17% menyatakan netral, dan sejumlah 7,7% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 1,3% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal mempunyai pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Dilihat dari pernyataan 1, responden yang menjawab sangat setuju 26%, sejumlah 70% menyatakan setuju, sejumlah 5% menyatakan netral, dan sejumlah 0% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju, bahwa adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur transparansi mendorong SKPD untuk menerapkan tsransparansi pelaporan keuangan. Pada pernyataan 2 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 19%, sejumlah 65% menyatakan setuju, sejumlah 17%

menyatakan netral, dan sejumlah 0% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa tuntutan dari gubernur/bupati/walikota akan mendorong SKPD berupaya untuk menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Pada pernyataan 3 sebanyak 9%% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 69% menyatakan setuju, sejumlah 11% menyatakan netral, dan sejumlah 9% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 3% menyatakan sangat tidak setuju, bahwa pemberitaan media massa mendorong akan diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

Pada pernyataan 4 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 12%, sejumlah 64% menyatakan setuju, sejumlah 14% menyatakan netral, dan sejumlah 11% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa kritik dari masyarakat mampu mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan. Pada pernyataan 5 sebanyak 5% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 52% menyatakan setuju, sejumlah 27% menyatakan netral, dan sejumlah 12% menyatakan tidak setuju, sejumlah 5% menyatakan sangat tidak setuju. Dengan pengawasan atau perhatian lebih dari lembaga swadaya masyarakat mampu meningkatkan SKPD dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Pada pernyataan terakhir responden yang menjawab sangat setuju sebesar 5%, sejumlah 54% menyatakan setuju, sejumlah 28% menyatakan netral, dan sejumlah 14% menyatakan tidak setuju, sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju, bahwa tuntutan pengusaha atau komunitas bisnis dapat mendorong SKPD dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan

**Tabel 4.8**

**Hasil Rekapitulasi Item Pernyataan Variabel Ketidakpastian Lingkungan  
(X2)**

KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN (X2)												
Pernyataan	Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X2.1	40	40	59	59	1	1	1	1	0	0	101	100
X2.2	38	38	52	52	11	11	0	0	0	0	101	100
X2.3	57	57	36	36	7	7	1	1	0	0	101	100
X3.4	52	52	39	39	9	9	1	1	0	0	101	100
Rata-rata	47%		46,5%		7%		0,8%		0%		100%	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.8 hasil jawaban dari responden pada variabel ketidakpastian lingkungan diketahui ada 101 responden. Jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarakan sangat beragam. Dilihat dari rata-rata responden, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 47%, sejumlah 46,5% menyatakan setuju, sejumlah 7% menyatakan netral, dan 0,8% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini berarti bahwa ketidakpastian lingkungan mempunyai pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Jika dilihat dari pernyataan 1 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 40%, sejumlah 59% menyatakan setuju, sejumlah 1% menyatakan netral, dan sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa SKPD menjaga hubungan yang baik dengan lingkungan dimana SKPD tersebut berada. Pada pernyataan 2 sebanyak 38% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 52% menyatakan setuju, sejumlah 11% menyatakan netral, dan sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD memperbaiki legitimasi untuk memperoleh

dukungan dari masyarakat. Pada pernyataan 3 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 57%, sejumlah 36% menyatakan setuju, sejumlah 7% menyatakan netral, dan sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan SKPD menyediakan informasi keuangan yang hanya berdampak positif bagi SKPD. Pada pernyataan terakhir sebanyak 52% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 39% menyatakan setuju, sejumlah 9% menyatakan netral, dan sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD menerapkan konsep transparansi yang telah diterapkan SKPD lain.



**Tabel 4.9**  
**Hasil Rekapitulasi Item Pernyataan Variabel Akuntabilitas (X3)**

AKUNTABILITAS (X3)												
Pernyataan	Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
X3.1	39	39	54	54	9	9	0	0	0	0	101	100
X3.2	57	57	44	44	0	0	0	0	0	0	101	100
X3.3	55	55	45	45	0	0	0	0	0	0	101	100
X3.4	41	41	58	58	2	2	0	0	0	0	101	100
X3.5	40	40	45	45	14	14	1	1	2	2	101	100
X3.6	48	48	53	53	0	0	0	0	0	0	101	100
X3.7	59	59	41	41	0	0	0	0	0	0	101	100
Rata-rata	49%		48,4%		4%		0,1%		0,3%		100%	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.9 hasil jawaban dari responden pada variabel akuntabilitas diketahui ada 101 responden. Jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarakan sangat beragam. Dilihat dari nilai rata-rata responden, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 49%, sejumlah 48,4% menyatakan setuju, sejumlah 4% menyatakan netral, dan sejumlah 0,1% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0,3% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini berarti akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Dilihat dari pernyataan 1 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 39%, sejumlah 54% menyatakan setuju, sejumlah 9% menyatakan netral, dan sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, edangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut membuktikan bahwa laporan keuangan yang disajikan SKPD dapat menjadi tolak ukur bagi para pengguna keuangan. Pada pernyataan 2 menunjukkan 57% responden menjawab sangat setuju, responden yang menjawab setuju sebesar 44%, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut membuktikan bahwa SKPD menyusun laporan keuangan secara lengkap dan tepat waktu. Pada pernyataan 3 responden menjawab sangat setuju sebesar 55%, responden yang menjawab setuju sebesar 45%, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa SKPD telah menyajikan transaksi dan peristiwa didalam laporan keuangan.

Pada pernyataan 4 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 41%, sejumlah 58% menyatakan setuju, sejumlah 2% menyatakan netral, sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa laporan keuangan tahunan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada pernyataan 5 menunjukkan 40% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 45% menyatakan setuju, sejumlah 14% menyatakan netral, sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 2% menyatakan sangat tidak setuju. Bahwa dalam laporan keuangan SKPD disajikan bebas dari kesalahan

material. Pada pernyataan 6 responden menjawab sangat setuju sebesar 48%, responden yang menjawab setuju sebesar 53%, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa SKPD telah menyajikan laporan keuangan secara akurat. Pada pernyataan terakhir sebanyak 59% responden menjawab sangat setuju, bahwa laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Rekapitulasi Item Pernyataan Variabel Sistem Pengendalian**  
**Internal (X4)**

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (X4)												
Pernyataan	Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
X4.1	25	25	73	73	2	2	1	1	0	0	101	100
X4.2	29	29	70	70	1	1	1	1	0	0	101	100
X4.3	19	19	76	76	3	3	2	2	0	0	101	100
X4.4	30	30	67	67	0	0	3	3	0	0	101	100
X4.5	27	27	67	67	3	3	3	3	0	0	101	100
X4.6	19	19	72	72	7	7	2	2	0	0	101	100
X4.7	22	22	77	77	0	0	1	1	0	0	101	100
X4.8	20	20	79	79	0	0	1	1	0	0	101	100
X4.9	30	30	62	62	7	7	1	1	0	0	101	100
Rata-rata	25%		72,2%		2,6%		1,7%		0%		100%	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.10 hasil jawaban dari responden pada variabel sistem pengendalian internal diketahui ada 101 responden. Jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarkan sangat beragam. Dilihat dari rata-rata responden, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 25%, sejumlah 72,2% menyatakan setuju, sejumlah 2,6% menyatakan netral, dan 1,7% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak



setuju. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Jika dilihat dari pernyataan 1, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 25%, responden yang menjawab setuju sebesar 73%, sejumlah 2% menyatakan netral, sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa kode etik secara tertulis sudah diterapkan dalam SKPD. Pada pernyataan 2 sebanyak 29% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 70% menyatakan setuju, sejumlah 1% menyatakan netral, sejumlah 1% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju, bahwa pimpinan SKPD telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik, maka dapat mendorong sistem pengendalian internal semakin baik. Pada pernyataan 3 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 19%, sejumlah 76% menyatakan setuju, sejumlah 3% menyatakan netral, sejumlah 2% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi dalam resiko sudah baik. Pada pernyataan 4 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30%, sejumlah 67% menyatakan setuju, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 3% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Bahwa SKPD telah menerapkan pengendalian internal terhadap resiko, maka akan mendorong sistem pengendalian internal semakin baik.

Pada pernyataan 5 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 27%, sejumlah 67% menyatakan setuju, sejumlah 3% menyatakan netral,

sejumlah 3% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas di SKPD telah didukung otoritas dari pihak yang berwenang. Pada pernyataan 6 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 19%, sejumlah 72% menyatakan setuju, sejumlah 7% menyatakan netral, responden yang menjawab tidak setuju 2%, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa SKPD telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai. Pada pernyataan 7 sebanyak 22% responden menjawab sangat setuju, sejumlah 77% menyatakan setuju, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa SKPD di kabupaten ponorogo telah menerapkan sistem informasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pada pernyataan 8 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 20%, sejumlah 79% menyatakan setuju, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 1% menyatakan tidak setuju, sedangkan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa SKPD telah melaksanakan sistem akuntansi dengan baik, maka dapat mendorong sistem pengendalian internal semakin baik. Pada pernyataan terakhir responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30%, sejumlah 62% menyatakan setuju, sejumlah 7% menyatakan netral, responden yang menjawab tidak setuju sebesar 1%, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan dalam SKPD dikabupaten ponorogo telah melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi

**Tabel 4.11**  
**Hasil Rekapitulasi Item Pernyataan Variabel Transparansi Pelaporan**  
**Keuangan (Y)**

TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN (Y)												
Pernyataan	Jawaban Responden										Total	
	SS		S		N		TS		STS			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y.1	44	44	56	56	0	0	0	0	0	0	101	100
Y.2	22	22	56	56	9	9	13	13	0	0	101	100
Y.3	50	50	51	51	0	0	0	0	0	0	101	100
Y.4	45	45	49	49	2	2	2	2	3	3	101	100
Y.5	35	35	61	61	4	4	0	0	0	0	101	100
Rata-rata	39%		55,2%		3%		3%		0,6%		100%	

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.11 hasil jawaban dari responden pada variabel transparansi pelaporan keuangan diketahui ada 101 responden. Jawaban responden atas kuesioner yang telah disebarakan sangat beragam. Dilihat dari rata-rata responden, responden yang menjawab sangat setuju sebesar 39%, sejumlah 55,2% menyatakan setuju, sejumlah 3% menyatakan netral, dan 3% menyatakan tidak setuju. Sedangkan sejumlah 0,6% menyatakan sangat tidak setuju

Jika dilihat dari pernyataan 1 menunjukkan 44% menjawab sangat setuju, responden yang menjawab setuju sebesar 56%, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut membuktikan bahwa SKPD hanya menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD. Pernyataan 2 responden yang menjawab sangat setuju sebesar 22%, sejumlah 56% menyatakan setuju, sejumlah 9% menyatakan netral, sejumlah 13% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju.

Bahwa SKPD juga menyampaikan informasi mengenai ketidak berhasilan pencapaian SKPD. Pada pernyataan 3 responden menjawab sangat setuju sebesar 50%, responden yang menjawab setuju sebesar 51%, sejumlah 0% menyatakan netral, sejumlah 0% menyatakan tidak setuju, dan sejumlah 0% menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut membuktikan bahwa dalam menyediakan laporan keuangan SKPD telah menyediakan secara akurat dan tepat waktu. Pernyataan 4 menunjukkan 45% responden menjawab sangat setuju, responden yang menjawab setuju sejumlah 49% bahwa SKPD telah menyediakan informasi keuangan mengenai input, output, dan outcome secara terbuka. Pada pernyataan terakhir responden yang menjawab sangat setuju sebesar 35%, sejumlah 61% responden menyatakan setuju, hal ini membuktikan bahwa SKPD menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan.

#### **4.1.3 HASIL DESKRIPTIF HASIL PENELITIAN**

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Untuk memberikan deskriptif ataupun gambaran terhadap analisis statistik.

Statistik deskriptif bisa mempermudah penarikan kesimpulan dalam penelitian. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif yaitu berupa frekuensi, tendensi sentral (mean, median, dan modus). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif memberikan gambaran tentang tanggapan dari responden terhadap variabel-variabel penelitian yaitu Tekanan Eksternal (X1), Ketidakpastian

Lingkungan (X2), Akuntabilitas (X3), Sistem Pengendalian Internal (X4), Dan Transparansi Pelaporan Keuangan (Y).

**Tabel 4.12**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tekanan eksternal	101	14	30	22,59	3,459
Ketidakpastian lingkungan	101	14	20	17,51	1,354
Akuntabilitas	101	26	35	31,05	2,351
Sistem pengendalian internal	101	32	45	37,66	2,673
Transparansi pelaporan keuangan	101	15	25	21,41	2,479
Valid N (listwise)	101				

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 101 responden. Variabel tekanan eksternal berkisar nilai terendah (minimum) sebesar 14 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 30. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel tekanan eksternal (X1) yaitu 22,59 dengan standar deviasi sebesar 3,459. Variabel ketidakpastian lingkungan berkisar nilai terendah (minimum) sebesar 14 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 20. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel ketidakpastian lingkungan (X2) yaitu 17,51 dengan standar deviasi sebesar 1,354. Variabel akuntabilitas berkisar nilai terendah (minimum) sebesar 26 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 35. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel akuntabilitas (X3) yaitu 31,05 dengan standar deviasi sebesar 2,351. Variabel sistem pengendalian internal berkisar nilai terendah (minimum) sebesar 32 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 45.

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel sistem pengendalian internal (X4) yaitu 37,66 dengan standar deviasi sebesar 2,673. Variabel transparansi pelaporan keuangan berkisar nilai terendah (minimum) sebesar 15 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 25. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) dari variabel transparansi pelaporan keuangan (Y) yaitu 21,41 dengan standar deviasi sebesar 2,479.

## 4.2 UJI KUALITAS DATA

### 4.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018) uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk dapat mengukur sah atau valid tidaknya dari suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Jadi uji validitas untuk mengukur apakah pernyataan dalam kuesioner yang sudah dibuat oleh peneliti betul-betul dapat mengukur apa yang hendak peneliti ukur. Untuk mengukur uji tersebut dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai dari  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ . Jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  dan nilai  $r$  positif pada tingkat signifikansi 5%, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 101 responden dengan demikian besar *defree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  adalah  $101 - 2 = 99$ , pada

tingkat signifikan 0,05 (5%) maka diperoleh nilai  $r_{\text{tabel}}$  sebesar 0,196.

Berikut ini hasil dari uji validitas menggunakan SPSS versi 22.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Validitas**

Tekanan Eksternal (X1)				
Keterangan	Item	R hitung	R tabel	Kriteria
Tekanan Eksternal (X1)	X1.1	0,423	0,196	Valid
	X1.2	0,645	0,196	Valid
	X1.3	0,887	0,196	Valid
	X1.4	0,805	0,196	Valid
	X1.5	0,872	0,196	Valid
	X1.6	0,783	0,196	Valid
Ketidakpastian Lingkungan (X2)				
Keterangan	Item	R hitung	R tabel	Kriteria
Ketidakpastian Lingkungan (X2)	X2.1	0,460	0,196	Valid
	X2.2	0,481	0,196	Valid
	X2.3	0,531	0,196	Valid
	X2.4	0,615	0,196	Valid
Akuntabilitas (X3)				
Keterangan	Item	R hitung	R tabel	Kriteria
Akuntabilitas (X3)	X3.1	0,487	0,196	Valid
	X3.2	0,590	0,196	Valid
	X3.3	0,675	0,196	Valid
	X3.4	0,620	0,196	Valid
	X3.5	0,431	0,196	Valid
	X3.6	0,760	0,196	Valid
	X3.7	0,655	0,196	Valid
Sistem Pengendalian Internal (X4)				
Keterangan	Item	R hitung	R tabel	Kriteria
Sistem Pengendalian Internal (X4)	X4.1	0,595	0,196	Valid
	X4.2	0,471	0,196	Valid
	X4.3	0,623	0,196	Valid
	X4.4	0,510	0,196	Valid
	X4.5	0,559	0,196	Valid
	X4.6	0,477	0,196	Valid
	X4.7	0,524	0,196	Valid
	X4.8	0,591	0,196	Valid
	X4.9	0,563	0,196	Valid
Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)				

Keterangan	Item	R hitung	R tabel	Kriteria
Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)	Y1.1	0,552	0,196	Valid
	Y1.2	0,807	0,196	Valid
	Y1.3	0,720	0,196	Valid
	Y1.4	0,830	0,196	Valid
	Y1.5	0,746	0,196	Valid

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021.

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa item pernyataan pada tiap-tiap variabel yakni tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, dan transparansi pelaporan keuangan telah menunjukkan angka  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,196). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan valid atau boleh dipakai.

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah uji untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban dari responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka data tersebut reliabel. Berikut hasil uji reliabilitas yang diuji menggunakan SPSS 22.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach alpha	Koefisiensi alpha	Keterangan
Tekanan Eksternal	0,789	0,6	Reliabel
Ketidakpastian Lingkungan	0,653	0,6	Reliabel
Akuntabilitas	0,731	0,6	Reliabel
Sitem Pengendalian Internal	0,728	0,6	Reliabel
Transparansi Pelaporan Keuangan	0,786	0,6	Reliabel

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021.



Pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* untuk masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari *Koefisiensi Alphanya*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada kuesioner penelitian ini reliabel atau handal.

#### 4.3 UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Uji Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis yang dinyatakan sebelumnya. Kebenaran yang dimaksud yaitu kebenaran mengenai nyata atau tidaknya hubungan antara tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan yaitu  $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$ . Adapun hasil perhitungan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	-10,350	3,527	
	Tekanan_eksternal	,201	,052	,281
	Ketidakpastian_lingkungan	,346	,132	,189
	Akuntabilitas	,170	,084	,162
	Sistem_pengendalian_internal	,421	,077	,454

Sumber: Output SPSS, Data diolah 2021.

Dari tabel 4.15 diatas persamaan regresi untuk pengaruh Tekanan Eksternal (X1), Ketidakpastian Lingkungan (X2), Akuntabilitas (X3), dan Sistem Pengendalian Internal (X4) Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan (Y) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -10,350 + 0,201X_1 + 0,346X_2 + 0,170X_3 + 0,421X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar -10,350, hal ini menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika Tekanan Eksternal ( $X_1$ ), Ketidakpastian Lingkungan ( $X_2$ ), Akuntabilitas ( $X_3$ ), dan Sistem Pengendalian Internal ( $X_4$ ) nilainya adalah 0, maka nilai Transparansi Pelaporan Keuangan ( $Y$ ) sebesar -10,350. Tidak adanya tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal maka transparansi tidak diterapkan oleh SKPD.
- 2) Nilai koefisiensi Tekanan Eksternal ( $X_1$ ) sebesar 0,201, menunjukkan bahwa variabel Tekanan Eksternal ( $X_1$ ) naik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap, maka Transparansi Pelaporan Keuangan ( $Y$ ) meningkat sebesar 0,201.
- 3) Nilai koefisiensi Ketidakpastian Lingkungan ( $X_2$ ) sebesar 0,346, menunjukkan bahwa variabel Ketidakpastian Lingkungan ( $X_1$ ) naik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap, maka Transparansi Pelaporan Keuangan ( $Y$ ) meningkat sebesar 0,346.
- 4) Nilai koefisiensi Akuntabilitas ( $X_3$ ) sebesar 0,170, menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_3$ ) naik sebesar satu satuan dengan asumsi

variabel independen lainnya bersifat tetap, maka Transparansi Pelaporan Keuangan (Y) meningkat sebesar 0,170.

- 5) Nilai koefisiensi Sistem Pengendalian Internal (X4) sebesar 0,421, menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X4) naik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bersifat tetap, maka Transparansi Pelaporan Keuangan (Y) meningkat sebesar 0,421.

#### 4.4 UJI HIPOTESIS

##### 4.4.1 Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2018) uji t merupakan uji hipotesis untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Cara pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis secara parsial atau secara individual dengan mengetahui nilai probabilitas dari hasil SPSS 22 atau dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Berdasarkan hasil analisis data dari bantuan SPSS 22, maka dapat ditunjukkan pada tabel 4.16 sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Parsial (t)**

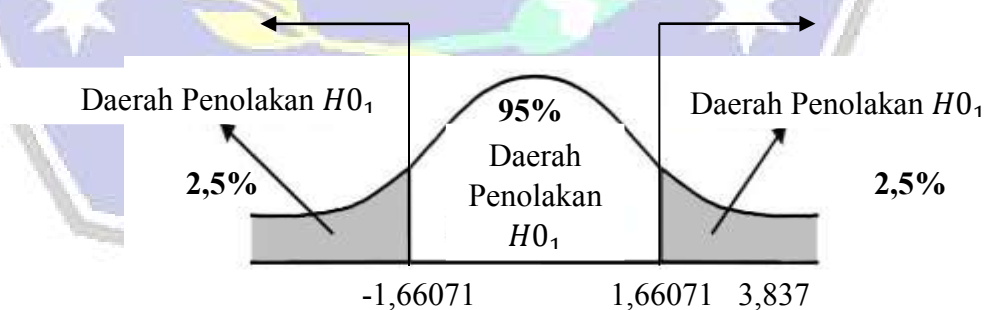
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10,350	3,527		-2,935	,004
Tekanan_eksternal	,201	,052	,281	3,837	,000
Ketidakpastian_lingkungan	,346	,132	,189	2,625	,010
Akuntabilitas	,170	,084	,162	2,023	,046
Sistem_pengendalian_inter nal	,421	,077	,454	5,499	,000

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 5% atau 0,05 dengan sampel berjumlah 101 responden, maka degree of freedom atau  $df = n - k = 101 - 4 = 97$  untuk uji dua arah dimana nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,66071 berdasarkan hasil pada tabel 4.16 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Berdasarkan hasil tabel 4.16 di atas, menunjukkan bahwa nilai  $t_{\text{hitung}}$  untuk hubungan antara variabel tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 3,837 dengan nilai signifikan 0,000. Untuk mengetahui hubungan antara tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan digambarkan pada daerah penolakan  $H_0$  atau penerimaan  $H_a$  sebagai berikut:



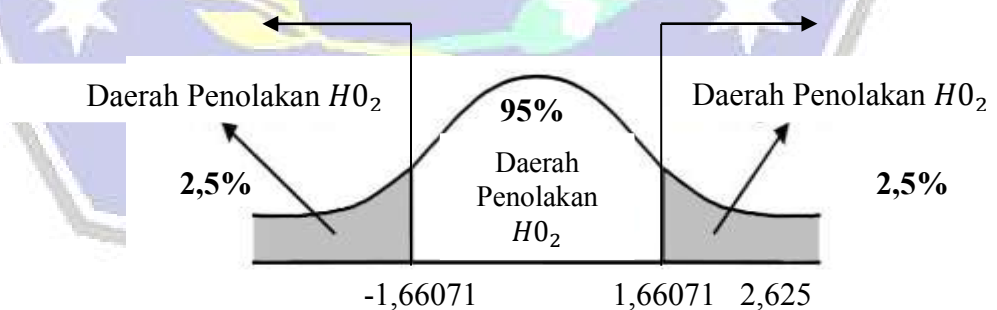
**Gambar 4.1 Hasil Uji t, Daerah Penerimaan  $H_0$  dan Penolakan  $H_0$  Variabel Tekanan Eksternal ( $X_1$ )**

Berdasarkan gambar 4.1  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 3,837 dan nilai  $t_{\text{tabel}}$  sebesar 1,66071 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan

berada dalam daerah penolakan  $H_{01}$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{01}$  ditolak dan  $H_{a1}$  diterima atau secara parsial ada pengaruh signifikan antara tekanan eksternal ( $X_1$ ) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan ( $Y$ ).

2) Pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas, dijelaskan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk hubungan antara variabel ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 2,625 dengan nilai signifikan 0,010. Untuk mengetahui hubungan antara ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan dapat digambarkan pada daerah penolakan  $H_{02}$  atau penerimaan  $H_{a2}$  sebagai berikut:



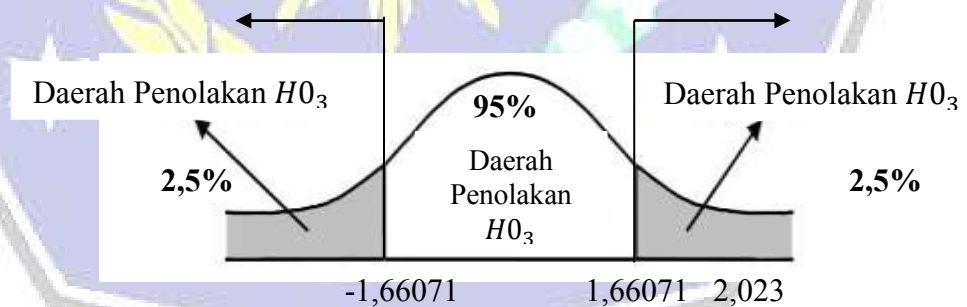
**Gambar 4.2 Hasil Uji t, Daerah Penerimaan  $H_0$  dan Penolakan  $H_0$  Variabel Ketidakpastian Lingkungan ( $X_2$ )**

Berdasarkan gambar 4.2  $t_{hitung}$  sebesar 2,625 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66071 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,010 < 0,05$  dan berada dalam daerah penolakan  $H_{02}$ . Hal ini menunjukkan bahwa

$H_{02}$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima atau secara parsial ada pengaruh signifikan antara ketidakpastian lingkungan ( $X_2$ ) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan ( $Y$ ).

3) Pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas, dijelaskan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk hubungan antara variabel akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 2,023 dengan nilai signifikan 0,046. Untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan digambarkan pada daerah penolakan  $H_{03}$  atau penerimaan  $H_{a3}$  sebagai berikut:



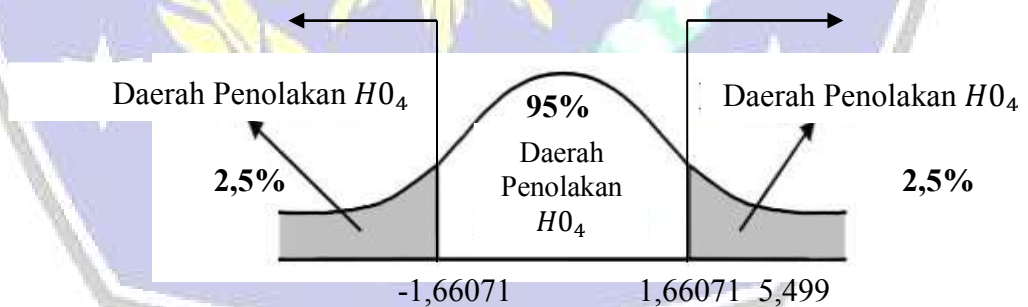
**Gambar 4.3 Hasil Uji t, Daerah Penerimaan  $H_0$  dan Penolakan  $H_0$  Variabel Akuntabilitas ( $X_3$ )**

Berdasarkan gambar 4.3  $t_{hitung}$  sebesar 2,023 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66071 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,046 < 0,05$  dan berada dalam daerah penolakan  $H_{03}$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{03}$  ditolak dan  $H_{a3}$  diterima atau secara parsial ada pengaruh signifikan

antara akuntabilitas (X3) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Y).

4) Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas, dijelaskan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk hubungan antara variabel sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 5,499 dengan nilai signifikan 0,000. Untuk mengetahui hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan digambarkan pada daerah penolakan  $H_{04}$  atau penerimaan  $H_{a4}$  sebagai berikut:



**Gambar 4.4 Hasil Uji t, Daerah Penerimaan  $H_0$  dan Penolakan  $H_0$  Variabel Sistem Pengendalian Internal (X4)**

Berdasarkan gambar 4.4  $t_{hitung}$  sebesar 5,499 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,66071 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan berada dalam daerah penolakan  $H_{04}$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{04}$  ditolak dan  $H_{a4}$  diterima atau secara parsial ada pengaruh signifikan

antara sistem pengendalian internal (X4) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Y).

#### 4.4.3 Uji F (Silmutan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 22, maka nilai  $F_{hitung}$  terkait variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut:

**Tabel 4.17**  
**Uji F (Simultan)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	322,172	4	80,543	26,463	,000 <sup>b</sup>
Residual	292,185	96	3,044		
Total	614,356	100			

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dijelaskan bahwa hasil output SPSS.22  $F_{hitung}$  terkait variabel tekanan eksternal (X1), ketidakpastian lingkungan (X2), akuntabilitas (X3), dan sistem pengendalian internal (X4) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Y) sebesar 26,463 Nilai  $F_{tabel}$  dihitung dengan menentukan df untuk pembilang yaitu  $df_1 = k - 1 = 5 - 1 = 4$  dan df penyebut yaitu  $df_2 = n - k = 101 - 5 = 96$ , maka  $F_{tabel}$  diperoleh nilai



sebesar 2,00 . Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui nilai dari  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ada pengaruh secara serempak atau bersama-sama antara tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

#### 4.4.3 Uji Koefisiensi Determinan ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) uji koefisiensi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam pengujian ini menunjukkan signifikansi hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.18**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,724 <sup>a</sup>	,524	,505	1,745

Sumber: Output SPSS, data diolah 2021

Dari tabel 4.18 hasil dari pengolahan data menunjukkan hasil nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) atau R square diperoleh sebesar 0,524 atau 52,4%. Nilai tersebut menggambarkan pengaruh variabel independen yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal terhadap naik turunnya variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan cukup berpengaruh. Adapun sisanya sebesar 47,6% merupakan sumbangan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi berganda yang diajukan dalam penelitian ini.

## 4.1 PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat diketahui ada tidaknya pengaruh antara tekanan eksternal (X1), ketidakpastian lingkungan (X2), akuntabilitas (X3), dan sistem pengendalian internal (X4) terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan (Y). Berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan bantuan program aplikasi SPSS.22, maka peneliti melakukan rekapitulasi dari hasil output pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis**

No	Hipotesis	Signifikan	Uji t/Uji F	Hasil	Keterangan
1	H <sub>01</sub> : tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan H <sub>a1</sub> : tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan	0,000	thitung = 3,837	H <sub>01</sub> ditolak, H <sub>a1</sub> diterima	Tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
2	H <sub>02</sub> : ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan H <sub>a2</sub> : ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan	0,010	thitung = 2,625	H <sub>02</sub> ditolak, H <sub>a2</sub> diterima	Ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
3	H <sub>03</sub> : akuntabilitas tidak berpengaruh	0,046	thitung = 2,023	H <sub>03</sub> ditolak,	Akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan

	terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan H <sub>a3</sub> : akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan			H <sub>a3</sub> diterima	transparansi pelaporan keuangan.
4	H <sub>04</sub> : sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan H <sub>a4</sub> : sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan	0,000	t <sub>hitung</sub> = 5,499	H <sub>04</sub> ditolak, H <sub>a4</sub> diterima	Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
5	H <sub>05</sub> : tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan H <sub>a5</sub> : tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi	0,000	F <sub>hitung</sub> = 26,463	H <sub>05</sub> ditolak, H <sub>a5</sub> diterima	Tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

	pelaporan keuangan				
	Koefisien Determinasi ( $R^2$ )		Nilai R square ( $R^2$ ) sebesar 0,524 atau 52,4% .		

sumber : Data diolah, 2021

Selain melakukan rekapitulasi skor setiap item pernyataan pada sub bab sebelumnya, peneliti juga melakukan rekapitulasi rata-rata jawaban responden pada setiap skor untuk menghasilkan nilai rekapitulasi jawaban responden pada setiap variabel. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui rata-rata hasil jawaban responden atas variabel yang digunakan.

**Tabel 4.20**  
**Rata-Rata Jawaban Responden Atas Variabel**

keterangan	Hasil Jawaban Responden					
	SS	S	N	TS	STS	Total
	%	%	%	%	%	%
Tekanan Eksternal (X1)	12,6	62,3	17	7,7	1,3	100
Ketidakpastian Lingkungan (X2)	46,8	46,5	7	0,8	0	100
Akuntabilitas (X3)	48,6	48,4	3,6	0,1	0,3	100
Sistem Pengendalian Internal (X4)	24,6	72,2	2,6	1,7	0	100
Transparansi Pelaporan Keuangan (Y)	39,2	55,2	3	3	0,6	100

Sumber: Output SPSS, data diolah, 2021

### **1. Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.20 hasil dari pengujian hipotesis pertama terkait pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan eksternal menunjukkan hasil nilai  $\beta$  yaitu 0,201 pada uji regresi dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,837 > 1,66071$ ) dengan nilai signifikansi 0,000. Dari hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan

transparansi pelaporan keuangan, sehingga hipotesis pertama ( $H_{01}$ ) ditolak ( $H_{a1}$ ) diterima. Sehingga variabel tekanan eksternal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya hasil rata-rata jawaban responden dalam mengisi pernyataan terkait dengan tekanan eksternal (X1). Pada tabel 4.23 bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju sebesar 12,6%, setuju sebesar 62,3%, dan tidak setuju 7,7%. Sehingga dapat disimpulkan, responden setuju bahwa tekanan eksternal mempengaruhi dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Adanya sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun pihak yang berkaitan sebenarnya bertujuan untuk menjadikan praktik dalam SKPD menjadi lebih baik (Putra, 2016). Sedangkan variabel transparansi pelaporan keuangan (Y) mayoritas responden menjawab setuju sebesar 55,2%, dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa SKPD Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan laporan keuangannya tentang berbagai informasi seperti keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian SKPD, informasi terkait input, output, dan outcome secara terbuka, serta telah menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu dan akurat dan memudahkan akses bagi pemangku kepentingan atas laporan keuangan.

Tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan-peraturan pemerintah (regulasi). Regulasi yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, dapat mengakibatkan SKPD merubah proses dan strukturnya (Ridha&Basuki, 2012). Tekanan eksternal dapat dikatakan sebagai dorongan untuk dilaksanakannya sebuah kebijakan yang berasal dari

luar organisasi, seperti dorongan dari pemerintah dalam bentuk peraturan atau tatanan hukum (Noprizal,2017). Tekanan eksternal salah satu komponen penting dalam mendukung upaya penerapan transparansi laporan keuangan daerah. Dimana semakin tinggi tekanan eksternal yang berasal dari luar SKPD maka dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan akan meningkat, dan tidak adanya tekanan yang berasal dari luar SKPD dapat berakibat kurangnya penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesnita (2016) mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan menunjukkan hasil bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Artinya tekanan eksternal meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ridha dan Basuki (2012) juga menunjukkan hasil yang sama. Tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, berupa kebijakan dan peraturan yang menjadi pemicu diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

## **2. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.20 hasil dari pengujian hipotesis kedua terkait pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Ketidakpastian lingkungan menunjukkan hasil nilai  $\beta$  yaitu 0,346 pada uji regresi dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,625 > 1,66071$ ) dengan nilai signifikansi 0,010. Dari hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan

terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sehingga hipotesis kedua ( $H_{02}$ ) ditolak ( $H_{a2}$ ) diterima. Sehingga variabel ketidakpastian lingkungan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan tabel 4.23 diketahui rata-rata jawaban responden dalam mengisi pernyataan terkait dengan ketidakpastian lingkungan (X2). Pada tabel 4.23 bahwa mayoritas responden menjawab setuju sebesar 46,5%, sangat setuju sebesar 46,8%, dan tidak setuju 0,8%. Sehingga dapat disimpulkan, SKPD menjaga keadaan lingkungan sekitar agar lebih stabil, untuk memperbaiki legitimasi, menyediakan informasi keuangan yang hanya berdampak positif dan untuk menerapkan konsep transparansi yang telah banyak diterapkan oleh SKPD lain. Sedangkan variabel transparansi pelaporan keuangan (Y) mayoritas responden menjawab setuju sebesar 55,2%, dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa SKPD Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan laporan keuangannya tentang berbagai informasi seperti keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian SKPD, informasi terkait input, output, dan outcome secara terbuka, serta telah menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu dan akurat dan memudahkan akses bagi pemangku kepentingan atas laporan keuangan. Semakin meningkatnya ketidakpastian lingkungan disuatu SKPD akan mendorong SKPD tersebut untuk mampu menyesuaikan dengan lingkungan barunya, sehingga ketika SKPD sudah siap dengan segala keadaan maka akan meningkatkan penerapan tranaparansi pelaporan keuangan.

Menurut Sihaloho (2013) menyatakan bahwa situasi seseorang yang terkandala untuk memprediksi situasi di sekitarnya, sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Pada kondisi ketidakpastian yang tinggi, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuatnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wintari dan Suardana (2018) ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dimana semakin tinggi ketidakpastian lingkungan, maka penerapan transparansi pelaporan keuangan semakin baik. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rohmandiyah (2018) menunjukkan hasil bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Jadi semakin baik kondisi lingkungan yang ada di instansi pemerintah daerah maka akan berdampak baik dan dapat meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### **3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.20 hasil dari pengujian hipotesis ketiga terkait pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas menunjukkan hasil nilai  $\beta$  yaitu 0,170 pada uji regresi dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,023 > 1,66071$ ) dengan nilai signifikansi 0,046. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sehingga hipotesis ketiga ( $H_{03}$ ) ditolak ( $H_{a3}$ ) diterima.



Sehingga variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya hasil rata-rata jawaban responden dalam mengisi pernyataan terkait dengan akuntabilitas (X3). Pada tabel 4.23 bahwa mayoritas responden menjawab setuju sebesar 48,4%, dan sangat setuju sebesar 48,6%. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa responden menyatakan adanya pengaruh akuntabilitas terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan variabel transparansi pelaporan keuangan (Y) mayoritas responden menjawab setuju sebesar 55,2%, dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa SKPD Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan laporan keuangannya tentang berbagai informasi seperti keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian SKPD, informasi terkait input, output, dan outcome secara terbuka, serta telah menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu dan akurat dan memudahkan akses bagi pemangku kepentingan atas laporan keuangan.

Dimana semakin tinggi akuntabilitas pada suatu organisasi, maka semakin tinggi pula penerapan transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas yang tinggi maka dapat mempercepat atau mendorong pelaksanaan transparansi pelaporan keuangan, apabila suatu SKPD memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka dapat diartikan SKPD tersebut memiliki pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kinerja finansial yang baik. Adanya akuntabilitas yang tinggi maka penerapan transparansi akan semakin baik.

Akuntabilitas mempunyai peranan penting dalam transparansi kepada publik, apabila pemerintah mampu menerapkan akuntabilitas maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tinggi, sebagai bentuk pertanggungjawabannya pemerintah daerah mampu menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitasnya kepada publik dan masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan informasi tersebut (Adha, 2014).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asroel (2016) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Rohmandiyah (2018) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, menurutnya dengan adanya akuntabilitas yang tinggi diyakini dapat memberikan kepercayaan yang lebih dari publik, sehingga harapan masyarakat akan adanya keterbukaan dari pemerintah dapat terwujud.

#### **4. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan tabel 4.20 hasil dari pengujian hipotesis keempat terkait pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal menunjukkan hasil nilai  $\beta$  yaitu 0,421 pada uji regresi dan nilai  $t_{hitung}$  yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $5,499 > 1,66071$ ) dengan nilai signifikansi 0,010. Dari hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sehingga

hipotesis keempat ( $H_{04}$ ) ditolak dan ( $H_{a4}$ ) diterima. Sehingga variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan tabel 4.23 diketahui rata-rata jawaban responden dalam mengisi pernyataan terkait dengan sistem pengendalian internal (X4). Pada tabel 4.23 bahwa mayoritas responden menjawab setuju sebesar 72,2%, dan sangat setuju sebesar 24,6%. Sehingga dapat disimpulkan, semakin baik rancangan sistem pengendalian internal pada SKPD maka akan mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal bukan hal baru dalam pemerintah, dimana pengendalian internal didalam pemerintah menjadi bagian penting. Pengendalian internal digunakan untuk dapat menjalankan proses eksekusi oleh pihak kepala daerah atau dinas ataupun anggota untuk mencapai tujuan organisasi (Wintari&Suardana, 2018). Sedangkan variabel transparansi pelaporan keuangan (Y) mayoritas responden menjawab setuju sebesar 55,2%, dan responden yang menjawab tidak setuju sebesar 3%, sehingga dapat disimpulkan bahwa SKPD Kabupaten Ponorogo telah menyampaikan laporan keuangannya tentang berbagai informasi seperti keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian SKPD, informasi terkait input, output, dan outcome secara terbuka, serta telah menyampaikan informasi tersebut secara tepat waktu dan akurat dan memudahkan akses bagi pemangku kepentingan atas laporan keuangan.

Semakin sistem pengendalian internal diterapkan dengan baik didalam pemerintah, maka pengungkapan proses transparansi pelaporan keuangan

akan menjadi lebih transparan. Dimana dengan sistem pengendalian internal, organisasi dapat mengarahkan, mengawasi dan dapat mengukir sumber daya yang ada didalam organisasi tersebut. Sebaliknya jika dalam organisasi tidak menerapkan pengendalian internal secara baik, maka tujuan dan proses eksekusi yang ada tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noprizal (2017) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yesnita (2016) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai dapat memberikan keyakinan memadai agar tercapainya tujuan organisasi.

##### **5. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Hipotesis kelima terkait pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, dapat dilihat dari hasil nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $26,463 > 2,00$ ) dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$   $df_1 = k-1 = 5-1 = 4$  ;  $df_2 = N - K$  atau  $101 - 5 = 96$ . Maka  $H_{05}$  diterima dan  $H_{a5}$  ditolak yang artinya variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Adanya hubungan yang searah antara tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, ketika variabel tersebut secara silmutan atau bersama-sama itu meningkat maka penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD juga akan meningkat. Sebaliknya apabila tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal itu kurang maka penerapan transparansi pelaporan keuangan juga akan rendah atau menurun.

